



Pendidikan Indonesia di Persimpangan Komoditas Politik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh

Mickhael Rajagukguk

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator - BOKS Project, Wahana Visi Indonesia
mikegukguk@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, transformasi perilaku masyarakat ke arah yang lebih produktif, serta percepatan pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya.¹ Sejumlah lembaga survei pun mengungkapkan bahwa akses dan kualitas pendidikan yang rendah menjadi satu dari sepuluh permasalahan utama Indonesia yang perlu dibenahi oleh pemerintah.² Tidak mengherankan, isu-isu terkait pendidikan kerap didiskusikan menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Kampanye Pasangan Calon Terpilih Versus Skor Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat 18 dari 26 pasangan kepala daerah tingkat provinsi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan 2020 yang terdokumentasi melalui media daring dan menjadikan pendidikan sebagai program kerja mereka. Jumlah ini setidaknya dapat menggambarkan ketertarikan terhadap isu pendidikan di mata masyarakat.

Provinsi	Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih	Program Kerja atau Pernyataan Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018		
Sumatera Utara	Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah	Menjadikan pendidikan sebagai satu dari lima Aspek Prioritas Pembangunan Provinsi ³ dan pemerataan kualitas fasilitas pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. ⁴



Riau	Syamsuar - Edy Nasution	Menyediakan pendidikan dengan biaya murah. ⁵
Sumatera Selatan	Herman Deru - Mawardi Yahya	Memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar yang hendak menempuh pendidikan di bidang pertanian. ⁶
Lampung	Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim	Sebagai satu dari sembilan program prioritas, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan tinggi. ⁷
Jawa Barat	Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum	<i>Smart class</i> untuk semua universitas di kabupaten dan kota, pendidikan gratis bagi golongan ekonomi lemah, dan Pesantren Juara. ⁸
Jawa Tengah	Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen	Pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan, melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. ⁹
Jawa Timur	Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak	Pendidikan gratis dan pengembangan pendidikan keagamaan. ¹⁰
Kalimantan Barat	Sutarmidji - Ria Norsan	Merealisasikan pembangunan Gedung Sekolah yang berkualitas, menjamin pendidikan kepada anak hingga Sekolah Menengah Atas, serta memfasilitasi perlengkapan sekolah yang bagus (seperti sepatu sekolah). ¹¹
Bali	I Wayan Koster - Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati	Pendidikan gratis. ¹²
Nusa Tenggara Barat	Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah	Pendidikan sebagai sektor penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), sekaligus mengakselerasi pengembangan sektor lainnya. ¹³
Nusa Tenggara Timur	Viktor Laiskodat - Josef Nae Soi	Empat Gerakan Transformasi (Prasarana, Sarana, dan Pendanaan, Tenaga Pendidik) di bidang pendidikan ¹⁴ dan menyekolahkan 10.000 pemuda NTT ke Luar Negeri. ¹⁵



Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020		
Sumatera Barat	Mahyeldi - Audy Joinaldy	Pemberian tunjangan khusus sebesar Rp2.500.000,00 untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; minimal 20% SMA/ SMK Negeri mengakomodasi siswa miskin; pembangunan fasilitas sekolah di tingkat SMA/SMK; dan memberikan seribu beasiswa kuliah di dalam maupun luar negeri. ¹⁶
Bengkulu	Rohidin Mersyah – Rosjonsyah	Pemberian beasiswa pelajar miskin melalui Kartu Bengkulu Sejahtera, biaya SPP gratis bagi SLTA/ sederajat dan SLB, beasiswa mahasiswa berprestasi, ¹⁷ dan memfasilitasi sekolah ramah disabilitas. ¹⁸
Jambi	Al Haris - Abdullah Sani	Memberikan beasiswa kepada mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi melalui Kartu Cerdas Mantap, ¹⁹ penambahan fasilitas ruang kelas di tingkat SLTA, dan pengembangan sekolah vokasi. ²⁰
Kepulauan Riau	Ansar Ahmad - Marlin Agustina	Pendidikan merupakan satu dari tujuh program unggulan, yang berfokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi guru, serta meningkatkan layanan pendidikan melalui sekolah gratis dan beasiswa. ²¹
Kalimantan Selatan	Sahbirin Noor – Muhidin	Meningkatkan pendidikan vokasi berbasis <i>link and match</i> yang menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan di sektor usaha. ²²
Kalimantan Utara	Zainal Arifin Paliwang - Yansen Tipa Padan	Masuk menjadi dua dari sepuluh program prioritas, yakni dengan mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun dan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Tenaga Pendidik. ²³



Sulawesi Tengah	Rusdy Mastura - Ma'mun Amir	Mengakomodasi pendidikan gratis melalui Kartu Sulteng Sejahtera. ²⁴
-----------------	-----------------------------	--

Tabel 1. Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih²⁵

Sayangnya, kampanye tersebut tidak sejalan dengan Indeks Pembangunan yang diperoleh masing-masing daerah tersebut (lihat lampiran). Rilis dari Global Data Lab menemukan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat nasional mengalami penurunan, dari 0,710 pada tahun 2018 menjadi 0,705 pada tahun 2021.²⁶ Rata-rata penurunan skor sebesar 0,005 juga dialami oleh 17 dari 18 daerah di atas (kecuali Kalimantan Utara).²⁷ Penghitungan indeks ini mengakomodasi 2 dari 4 penilaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4.²⁸

Penurunan kualitas pendidikan melalui perolehan Indeks Pembangunan Manusia yang dialami oleh daerah-daerah yang mengampanyekan “pentingnya pendidikan”, menjadi pertanda bahwa upaya-upaya pemajuan pendidikan masih belum diujai secara serius oleh pemerintah dan sekadar dijadikan sebagai mesin pencari suara belaka.²⁹ Bahkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) mengaminkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia cenderung mengalami penurunan apabila mengacu kepada penilaian Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA), yang menempatkan Indonesia pada urutan 74 dari 79 negara.³⁰

Analisis

Schiefelbein dan McGinn tidak menampik bahwa rekonstruksi terhadap pendidikan memang tidak luput dari campur tangan para elite politik yang mengemban jabatannya.³¹ Pada hakikatnya, mereka tidak hanya berperan dalam mendiagnosis permasalahan dan merancang rekomendasi tingkat tinggi, namun juga mengembangkan rencana aksi, mengidentifikasi risiko dan tindakan mitigasi dari kebijakan, serta menganggarkan biaya secara akuntabel.³²

Berdasarkan sebagian besar temuan di atas, terlihat bahwa konsep dan gagasan terkait pendidikan yang dibawakan para politikus terkesan konservatif dan tidak ada kebaruan. Program yang dirancang hanya meniru program yang telah ada (baik yang dirancang oleh pemerintah pusat atau pejabat pemerintahan di daerah lain), dengan “mengganti kemasan” yang telah ada. Sebagai contoh, pemberian bantuan uang tunai kepada penerima manfaat individu sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahan dalam proses pengembangan sumber daya manusia.





Minimnya pertimbangan terhadap kebijakan berbasis bukti dalam perumusan aturan di tingkat pemerintah pun menjadi penghambat dalam proses implementasi pendidikan yang berkualitas. Upaya dalam digitalisasi hingga westernisasi memang terkesan menarik, namun sebenarnya tidak menyentuh akar permasalahan dalam pengembangan sektor pendidikan. Contoh kecilnya adalah digitalisasi akses pendidikan dalam kurikulum merdeka, di mana pada praktiknya, sekolah-sekolah hanya memiliki perangkat digital yang terbatas. Selain itu, 52,88% tenaga pendidik yang didominasi kelompok usia tua (40-≥65 tahun),³³ masih belum memiliki kompetensi digital yang mumpuni.³⁴

Masifnya tindak kolusi dan nepotisme di Indonesia juga masih menjadi penghambat, sekaligus berpotensi untuk mendegradasi inovasi dalam pengembangan suatu program.³⁵ Masalah ini masih terus menjamur, mengingat masih lemahnya fungsi pengawasan di level pemerintah yang bahkan ikut melanggengkan praktik tersebut. Kondisi ini berdampak pula pada pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dimaklumi, walaupun perbuatan tersebut melanggar hukum.³⁶ Pola pikir ini tentu merupakan preseden buruk bagi keberlangsungan dan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Beberapa masalah tersebut kerap menciptakan dilema di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan solusi-solusi konkret untuk menyelesaikannya. Pertama, terkait perumusan kebijakan, intervensi dari unsur-unsur masyarakat, seperti guru, kepala sekolah, hingga pelajar sekalipun, sangatlah diperlukan. Keterlibatan lembaga-lembaga riset independen dalam merumuskan instrumen pengkajian tersebut juga tidak kalah penting, sehingga dapat menghindari bias keberpihakan terhadap daerah atau konstituen tertentu. Keterlibatan lembaga riset dalam hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam mendeskripsikan kendala nyata bidang pendidikan di wilayahnya. Akar permasalahan pengembangan pendidikan di daerah tersebut dapat dianalisis dengan saksama dan pemerintah dapat menentukan peta jalan pendidikan yang tepat untuk mereduksi permasalahan-permasalahan tersebut, yang terdokumentasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Opsi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam menghimpun berbagai aspirasi masyarakat akar rumput. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah sering lalai dan menyamaratakan solusi untuk setiap masalah pendidikan di daerahnya, karena tidak adanya partisipasi masyarakat di dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi mulai dari tingkat akar rumput ini sebenarnya terbukti efektif, asal pemangku kebijakan di tingkat desa hingga kota/kabupaten tetap mengedepankan akuntabilitas dan tidak berat sebelah terhadap kepentingan kelompok tertentu. Aspirasi ini tentunya dapat





menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan sesuai dengan konteks masing-masing wilayah, disertai dengan data pendukung dari pemerintah. Hal ini tentunya akan mendukung terjadinya efektivitas alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan konteks masalah yang ada di masing-masing wilayah tersebut.

Pemerintah juga dapat mulai berbenah dengan mulai fokus terhadap pengembangan SDM dan fasilitas pendukung, baik di dalam ataupun luar sekolah. Kebijakan ini cenderung sangat minim diimplementasikan oleh pemangku kebijakan yang cenderung memilih untuk mengalokasikan anggaran berupa bantuan uang tunai terhadap individu, khususnya terhadap para pelajar. Selain rawan tindak pidana korupsi apabila tidak diawasi penggunaannya, bantuan tersebut juga kemungkinan besar tidak akan dimanfaatkan oleh wali murid ataupun sekolah untuk kepentingan penerima manfaat pelajar. Pengembangan SDM dan fasilitas pendukung mungkin merupakan opini yang tidak populer di mata masyarakat, namun kebijakan ini memiliki dampak yang nyata dalam memaksimalkan kualitas SDM.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam memberantas tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Perwujudan komitmen pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang bersih juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Pemerintah dapat mulai meminimalisasinya melalui pelaksanaan rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, akuntabel, dan sistematis, termasuk dalam hal lelang jabatan eselon yang acapkali diwarnai dengan tindak suap atau jual-beli jabatan. Tentunya, pejabat hingga tenaga pendidik yang terpilih berdasarkan kredibilitas dan kompetensinya yang mumpuni dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan hingga pembangunan di daerah tersebut.

Kesimpulan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara garis besar masih berbentuk narasi-narasi dalam janji kampanye yang mereka gaungkan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berpaku pada hasil asesmen, seperti PISA atau Indeks Pembangunan Manusia semata.³⁷ Lebih dari itu, peningkatan kualitas pendidikan juga beririsan dengan penurunan kesenjangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.³⁸ Pentingnya implementasi pendidikan yang berkualitas oleh pemerintah sangat diperlukan dan dapat diwujudkan sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing.





Endnotes

- 1 Manos Antoninis, Marcos Delprato, & Aaron Benavot, "Inequality in education: the challenge of measurement," *World social science report*, Challenging inequalities, pathways to a just world (2016): 63-67, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245937>; UNESCO, *Sustainable Development Begins With Education* (Paris, 2014), <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2275sdbeginswitheducation.pdf>
- 2 Indikator Politik Indonesia. "Dinamika Elektoral Capres Dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru (Temuan Survei Nasional: Februari 2023 dan Maret 2023)," 26 Maret 2023 <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2023/03/Rilis-Indikator-26-Maret-2023.pdf>; Good News From Indonesia & Lembaga Survei KedaiKOPI, "Laporan Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022," 10 Agustus 2022, <https://kedaikopi.co/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Survei-Indeks-Optimisme-Generasi-Muda-Indonesia-2022.pdf>
- 3 Suci Rizqi Lestari, "Kampanye Akbar, Edy Rahmayadi Prioritaskan Lima Aspek Pembangunan," *Detik News*, 22 April 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3985063/kampanye-akbar-edy-rahmayadi-prioritaskan-lima-aspek-pembangunan>
- 4 Wahyudi Aulia Siregar, "Musa Rajekshah Janjikan Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Seluruh Sumut," *Okezone*, 2 Mei 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/05/02/340/1893659/musa-rajekshah-janjikan-pemerataan-fasilitas-pendidikan-di-seluruh-sumut>
- 5 Budi Warsito, "Syamsuar Tak Menyangka Banyak Persoalan di Pekanbaru," *Jawa Pos*, 15 Februari 2018, <https://www.jawapos.com/pemilihan/01100664/syamsuar-tak-menyangka-banyak-persoalan-di-pekanbaru>
- 6 Irawansyah Perdana, "HD : Pertanian Maju, Sumsel Sejahtera," *Sriwijaya Media*, 24 April 2018, <https://sriwijayamedia.com/politik/read/239352/hd-pertanian-maju-sumsel-sejahtera>
- 7 E.H. Ismail, "Arinal-Nunik Usung Sembilan Program Lampung Berjaya," *Republika*, 24 April 2018, <https://news.republika.co.id/berita/p7p2co453/arinalnunik-usung-sembilan-program-lampung-berjaya>
- 8 Kompas.com, "Kenali dan Pilih Calonmu di Pilkada Jawa Barat 2018," 26 Juni 2018, <https://jeo.kompas.com/kenali-dan-pilih-calonmu-di-pilkada-jawa-barat-2018>
- 9 Kompas.com, "Kenali dan Pilih Calonmu di Pilkada Jawa Tengah 2018," 26 Juni 2018, <https://jeo.kompas.com/pilih-siapa-di-pilgub-jawa-tengah-2018>
- 10 Kompas.com, "Kenali dan Pilih Calonmu di Pilkada Jawa Timur 2018," 26 Juni 2018, <https://jeo.kompas.com/pilih-siapa-di-pilgub-jawa-timur-2018>
- 11 Madrosid, "Gedung Sekolah di Pontianak Bagus-bagus, Bukti Nyata Sutarmidji Perhatikan Pendidikan," *Tribun Pontianak*, 19 Februari 2018, <https://pontianak.tribunnews.com/2018/02/19/gedung-sekolah-di-pontianak-bagus-bagus-bukti-nyata-sutarmidji-perhatikan-pendidikan?page=all>
- 12 Bali Post, "Lestarkan dan Kembangkan Seni Budaya Bali Berbasis Banjar, Masyarakat Gelgel Siap Menangkan Koster-Ace dan BAGIA," 11 Maret 2018, https://issuu.com/epaper-kmb/docs/bpo_11032018, hlm. 3.
- 13 Sumbawa News, "Cagub NTB Zulkieflimansyah, Segudang Prestasi Sejak Usia Muda," 12 April 2018, <https://sumbawanews.com/berita/berita-utama/cagub-ntb-zulkieflimansyah-segudang-prestasi-sejak-usia-muda/>
- 14 Bonne Pukan, "Empat Hal Penting yang Disiapkan Victory-Joss Untuk Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan," *NTT Satu*, 24 Juni 2018, <https://www.nttsatu.com/empat-hal-penting-yang-disiapkan-victory-joss-untuk-peningkatan-pendidikan-dan-kesehatan/>; Radar NTT, "Saatnya NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI," 24 Mei 2018, <https://radarntt.co/news/2018/saatnya-ntt-bangkit-menuju-masyarakat-sejahtera-dalam-bingkai-nkri/>
- 15 Bonne Pukan, "Sekolahkan 10.000 Pemuda NTT ke Luar Negeri, Victory Joss Tidak Gunakan APBD," *NTT Satu*, 22 Februari 2018, <https://www.nttsatu.com/sekolahkan-10-000-pemuda-ntt-ke-luar-negeri-victory-joss-tidak-gunakan-apbd/>
- 16 Mulyadi Muslim, "Mewujudkan Sumbar Madani," *Antara Sumbar*, 21 November 2020, <https://sumbar.antaranews.com/berita/398464/mewujudkan-sumbar-madani>



- 17 Alfridho A. P. "18 Program Kerja Rohidin-Rosjonsyah untuk Sejahterakan Masyarakat," *Bengkulu Interaktif*, 16 November 2020, <https://www.bengkuluinteraktif.com/18-program-kerja-rohidin-rosjonsyah-untuk-sejahterakan-masyarakat>
- 18 Radar Bengkulu Online, "Rohidin Pastikan Bengkulu Berintegritas Dimulai Dari Diri Sendiri," 25 November 2020, <https://radarbengkulu.disway.id/read/311182/rohidin-pastikan-bengkulu-berintegritas-dimulai-dari-diri-sendiri>
- 19 Radar Jambi, "Peduli Milenial, Al Haris-Sani Suggest Program Kartu UKM Mantap dan Cerdas Mantap," 4 November 2020, <https://radarjambi.co.id/read/2020/11/04/25573/peduli-milenial-al-harissani-suggest-program-kartu-ukm-mantap-dan-cerdas-mantap/>
- 20 Bekabar.id, "Untuk Sarolangun, Ini Rincian Program Pembangunan Al Haris-Abdullah Sani," 19 November 2020, <https://bekabar.id/site/content/politik/untuk-sarolangun-ini-rincian-program-pembangunan-al-haris-abdullah-sani>
- 21 Sijori Kepri, "Ansar Ahmad dan Marlin Aguntina Sampaikan Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri PDF," 12 Oktober 2020, <https://sijorikepri.com/ansar-ahmad-dan-marlin-aguntina-sampaikan-visi-misi-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-kepri-pdf/2/>
- 22 Barito Post, "Ini Visi Misi Pasangan BirinMu," 25 November 2020, <https://www.baritopost.co.id/ini-visi-misi-pasangan-birinmu/>
- 23 Kita Teropong, "Ziyap Andalkan 10 Program Unggulan," 25 Oktober 2020, <https://kitateropong.com/2020/10/25/ziyap-andalkan-10-program-unggulan/>
- 24 Harso Kurniawan, "Warga Ingin Miliki Kartu Sulteng Sejahtera Rusdy-Ma'mun," *Berita Satu*, 30 November 2020, <https://www.beritasatu.com/pilkada/704275/warga-ingin-miliki-kartu-sulteng-sejahtera-rusdymamun>
- 25 Diolah dari berbagai sumber pemberitaan daring selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi pada tahun 2018 (15 Februari - 26 Juni 2018) dan tahun 2020 (26 September - 5 Desember 2020).
- 26 Global Data Lab, "Subnational HDI," <https://globaldatalab.org/shdi/table/shdi/IDN/>
- 27 *Ibid.* Kalimantan Utara tidak diikutkan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis oleh Global Data Lab.
- 28 Dua indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digunakan adalah Target 4.3. menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas; Target 4.4. meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- 29 Firman Noor, *Partai Politik sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: LIPI Press, 2018), <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1550563090.pdf>
- 30 Faustinus Nua, "Skor PISA Diprediksi Tak Naik, Nadiem Minta Maaf," *Media Indonesia*, 25 Januari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/553228/skor-pisa-diprediksi-tak-naik-nadiem-minta-maaf>
- 31 Ernesto Schiefelbein & Noel F. McGinn, *Learning to Educate: Proposals for the Reconstruction of Education in Developing Countries* (Rotterdam: Sense Publishers, 2017).
- 32 David Bridges, *Philosophy in Educational Research Epistemology, Ethics, Politics and Quality*, (Springer, 2017).
- 33 Dwi Hadya Jayani, "Mayoritas Guru di Indonesia Generasi Milenial," *Databoks Katadata*, 11 Januari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/mayoritas-guru-di-indonesia-generasi-milenial>
- 34 Rizki Ameliah, Rangga Adi Negara, & Indriani Rahmawati, *Status Literasi Digital di Indonesia 2021*, (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_diIndonesia%20_2021_190122.pdf
- 35 Syamsul Ashar, "Ketua KPK: Harga Jabatan Eselon - Kepala Dinas di Bangkalan Rp 50 Juta -Rp 150 juta," *Kontan*, 8 Desember 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-harga-jabatan-eselon-kepala-dinas-di-bangkalan-rp-50-juta-rp-150-juta>



THC INSIGHTS

No. 37 / 03 Juli 2023
www.habibiecenter.or.id

- 36 Asmiati Malik, "Nepotisme berdampak buruk bagi ekonomi, tapi banyak orang menganggapnya enteng," *The Conversation*, 16 Oktober 2018. <https://theconversation.com/nepotisme-berdampak-buruk-bagi-ekonomi-tapi-banyak-orang-menganggapnya-enteng-104575>
- 37 Zlata Bruckauf & Yekaterina Chzhen, *Education for All? Measuring inequality of educational outcomes among 15-year-olds across 39 industrialized nations*, (Florence: UNICEF, 2016), https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP_2016_08.pdf/
- 38 Greg J. Duncan & Richard J. Murnane, *Restoring Opportunity The Crisis of Inequality and the Challenge for American Education*, (Cambridge: Harvard Education Press, 2014).



Lampiran

Tabel Indeks Pembangunan Manusia oleh pasangan calon Kepala Daerah Tingkat Provinsi masa pemilihan 2018 dan 2020, sebelum dan sesudah mengemban jabatan sebagai Kepala Daerah (Sumber: Global Data Lab, Nijmegen School of Management of Radboud University).

Provinsi	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Indeks
Sumatera Utara	0.702	0.709	0.702	0.697	-0.005
Riau (termasuk Kepulauan Riau)	0.722	0.728	0.721	0.716	-0.006
Sumatera Selatan	0.702	0.709	0.702	0.697	-0.005
Lampung	0.7	0.706	0.699	0.694	-0.006
Jawa Barat	0.712	0.719	0.711	0.707	-0.005
Jawa Tengah	0.709	0.716	0.709	0.704	-0.005
Jawa Timur	0.708	0.715	0.707	0.703	-0.005
Kalimantan Barat	0.684	0.690	0.683	0.679	-0.005
Bali	0.736	0.742	0.735	0.73	-0.006
Nusa Tenggara Barat	0.695	0.702	0.694	0.69	-0.005
Nusa Tenggara Timur	0.654	0.66	0.653	0.649	-0.005
Sumatera Barat			0.733	0.728	-0.005
Bengkulu			0.72	0.716	-0.004
Jambi			0.703	0.698	-0.005
Kalimantan Selatan			0.694	0.689	-0.005
Sulawesi Tengah			0.69	0.685	-0.005





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id